



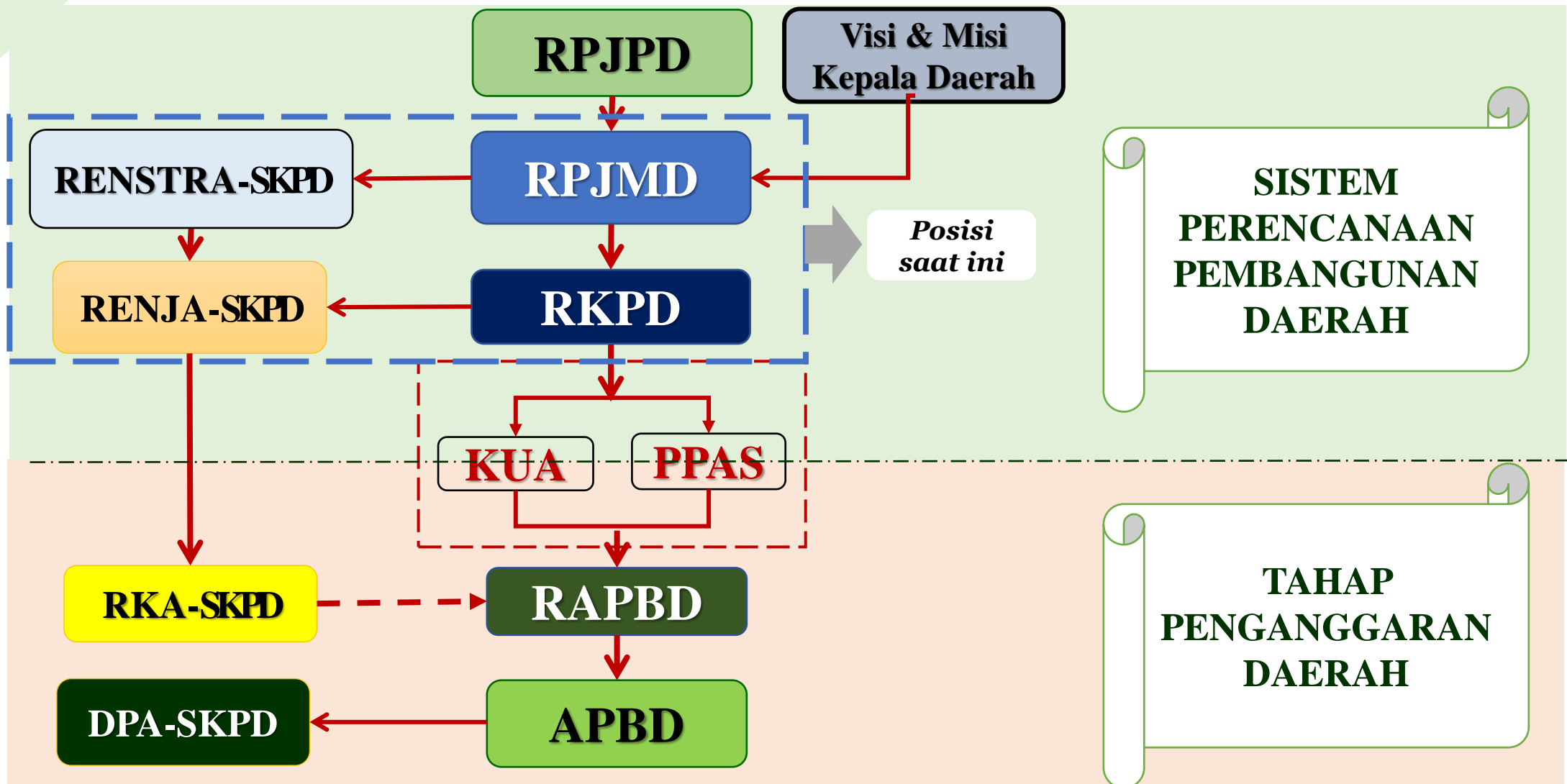
# **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN DALAM PERSPEKTIF RPJMD PROV. KALTIM**

Oleh :  
**PROF. DR. IR. H. M. ASWIN, MM**  
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim

Dalam Acara  
**Musrenbang RPJMD 2021-2026 Kota Balikpapan**  
**16 September 2021**



# HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH





# VISI MISI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

”

## ***BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT***

”

### Berani

Pemerintah mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat.

### Berdaulat

Kalimantan Timur memiliki **kemantapan** dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik

Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dan dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar

Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki **daya saing**







# CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

## LPE

Target 2021 : **-1,00**

Capaian Tw II 2021 :  
**5,76% (yoy)**

## TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Target 2021 : **6,81%**

Capaian Tw I 2020 : **6,81%** (Feb 2021)

## PDRB PER KAPITA

Target 2021 : **167,5 Jt**

Capaian Tw IV 2020 :  
**Rp 160,11 Jt**

## INDEKS GINI

Target 2021 : **0,313**

Capaian Tw I 2021 : **0,334**

## TINGKAT KEMISKINAN

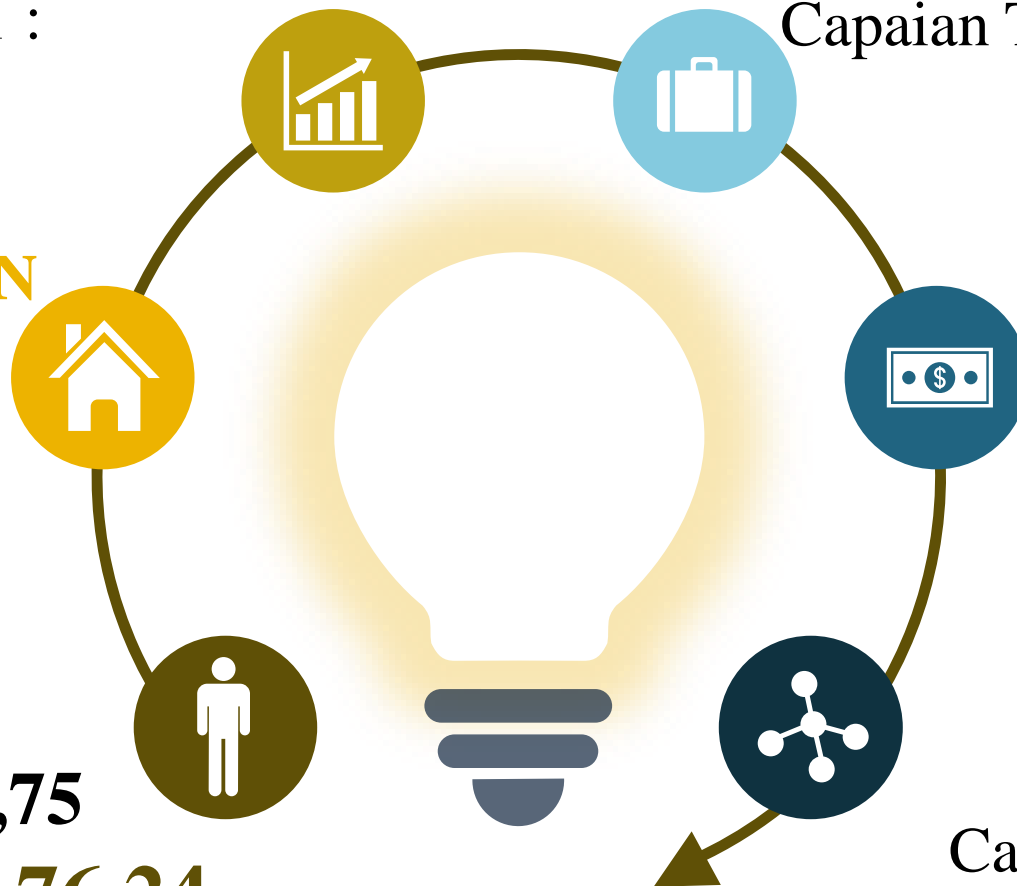
Target 2021 :  
**6,05%**

Capaian Tw I 2021 :  
**6,54%**

## IPM

Target 2021 : **76,75**

Capaian Tw IV 2020 : **76,24**





# ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

## ISU INTERNASIONAL

**Kelesuan Perekonomian Global**

**Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

**Pembangunan Ekonomi Hijau (*Green Development*)**

**Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim (*Paris Agreement*)**

## ISU NASIONAL

**RPJM Nasional Tahun 2020-2024**

**Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur**

## ISU KEWILAYAHAN

**Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

**Peningkatan Daya Saing Daerah**

**Pemanfaatan Ruang**

**ISU-ISU  
STRATEGIS**





# ISU STRATEGIS P-RPJMD 2019-2023



- Reformasi Struktural - 08**  
menuju Tata Normal  
Baru Pasca COVID-19
- Pembangunan Ibukota - 07**  
Negara (IKN)
- Pemenuhan Standar - 06**  
Pelayanan Minimal (SPM)
- Pemerintahan yang - 05**  
profesional dan akuntabel



- 01 - Peningkatan Daya Saing**  
Sumber Daya Manusia
- 02 - Percepatan Transformasi**  
ekonomi berbasis SDA  
tidak terbarukan ke SDA  
terbarukan secara vertikal  
maupun horizontal
- 03 - Peningkatan aksesibilitas**  
dan penguatan konektivitas  
serta pengembangan  
infrastruktur dasar  
pembangunan
- 04 - Peningkatan Kualitas**  
Lingkungan Hidup





# PERMASALAHAN UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM

***“Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kaltim ”.***

Pokok Masalah = 6

Permasalahan = 29

Akar Masalah = 88

**Tingginya ketimpangan  
Daya Saing SDM**  
4 PM-12 AM

1

2

**Kesejahteraan belum Terwujud  
Secara Adil & Merata**  
2 PM-4 AM

3

**Lambatnya  
Transformasi Ekonomi  
menuju pengelolaan  
Sumber Daya Alam  
berkelanjutan** 11 PM-37 AM

**Belum optimalnya  
Pemerataan &  
Pengembangan  
Pelayanan  
Infrastruktur Dasar**  
6 PM-12 AM

4

5

2 PM-4 AM  
**Meningkatnya resiko  
penurunan kualitas  
Lingkungan Hidup**

6

**Tata Pemerintahan  
belum menghasilkan  
Layanan & Kebijakan  
Publik yang  
Berorientasi pada  
Kedaulatan Masyarakat**  
4 PM-9 AM



[bappeda.kaltimprov.go.id](http://bappeda.kaltimprov.go.id)



@bappedaKaltim



# PERUBAHAN TARGET INDIKATOR MAKRO RPJMD 2019-2023

## IPM

2023  
SEMULA 76,87  
MENJADI  
77,75



## PDRB

PER KAPITA  
2023  
175 JT  
(baru)



## INDEX GINI

2023  
SEMULA 0,326  
MENJADI  
0,308



## TINGKAT KEMISKINAN

2023  
SEMULA 5,70%  
MENJADI  
5,90%



## TINGKAT PENGANGGURAN

2023  
6,5%  
(baru)



## LPE

2023  
SEMULA 3,5±1  
MENJADI  
3,5±1



Dengan latar belakang perubahan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah maka target kinerja indikator makro pembangunan pada akhir periode RPJMD (tahun 2023) dilakukan penyesuaian.







# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PADA PERUBAHAN RPJMD KALTIM 2019-2023

## Pembangunan kewilayahan diarahkan

Menyelesaikan isu ketimpangan  
kabupaten/kota

Dengan sasaran antara lain:

1. meningkatnya pemerataan antar wilayah (kota dan kabupaten);
2. meningkatnya keunggulan kompetitif masing-masing kab/kota;
3. meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian kab/kota;
4. meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Pusat Ekonomi”.

## Strategi dan Pendekatan Pengembangan Wilayah

### Koridor Pertumbuhan

“memacu pertumbuhan ekonomi provinsi melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi, KEK, KI, dan KSP, serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan”

### Koridor Pemerataan

“meningkatkan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas terutama pada kecamatan dalam koridor pemerataan”

**Target, Major Project dan Proyek Prioritas di 10  
Kab/Kota**



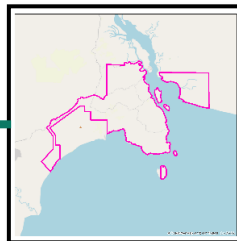


# PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

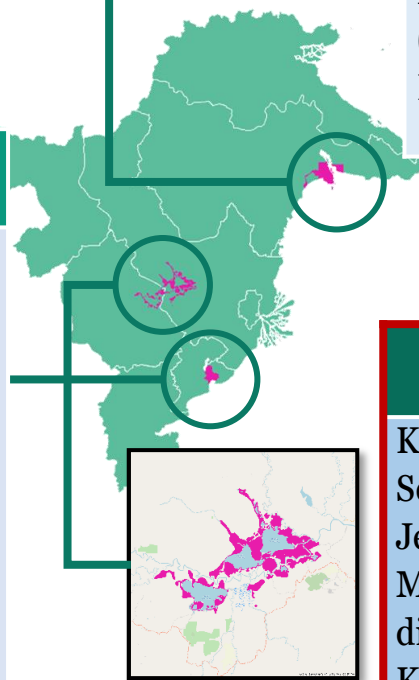
## Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi



KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
Kawasan Industri Kariangau–Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan)	Pengembangan Aneka Industri dan Agroindustri yang terintegrasi	Percepatan realisasi investasi industri pengolahan, pengembangan <i>direct call</i> terminal pelabuhan peti kemas, dan percepatan penyelesaian jaringan infrastruktur antar kawasan sekitarnya.



KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan pusat/sentra pengolahan <i>oleo chemical</i> berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier)	Percepatan realisasi investasi industri pengolahan kelapa sawit, <i>oleo chemical</i> , dan industri turunannya.

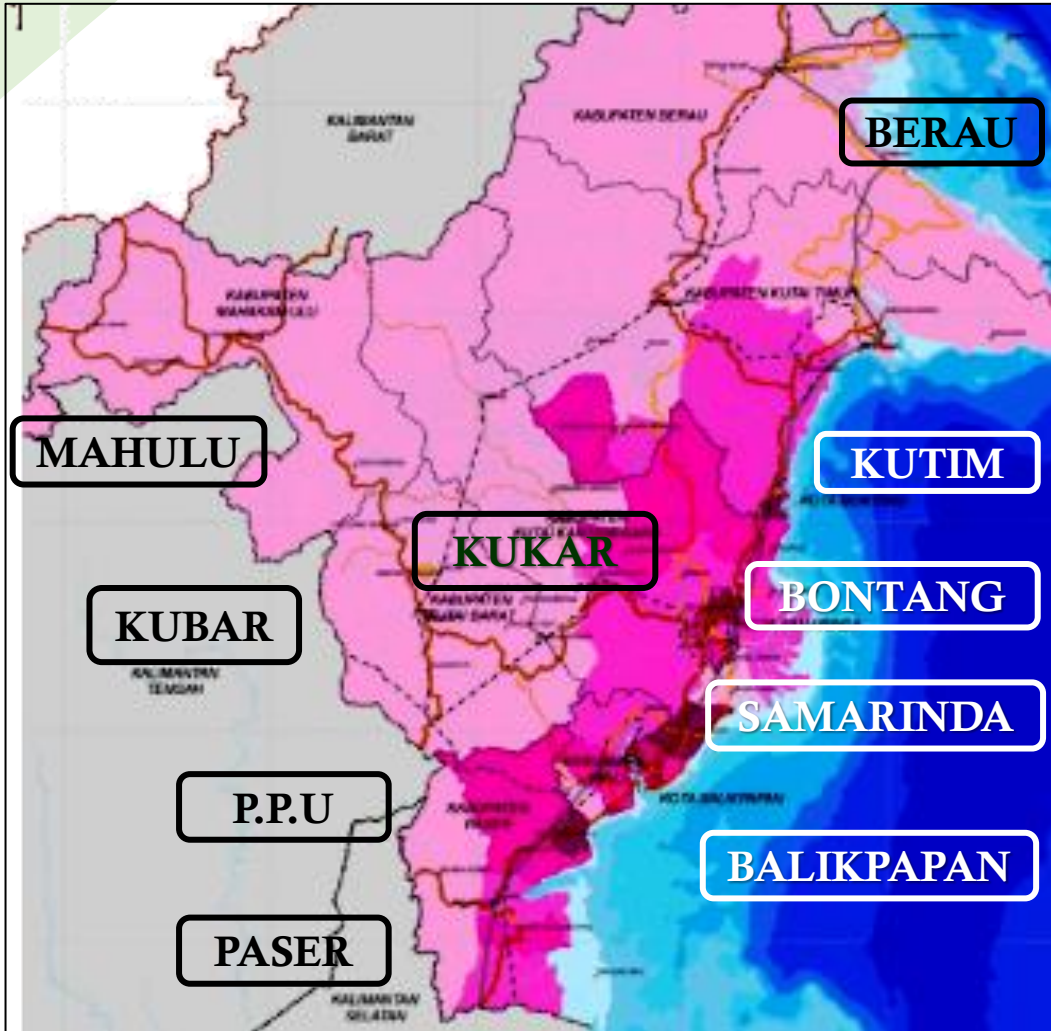


KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat	Peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan sekitarnya	Pengembangan Ekowisata, peningkatan nilai tambah produk Perikanan, pengendalian banjir





# Strategi Pembangunan Wilayah Kab. Kota

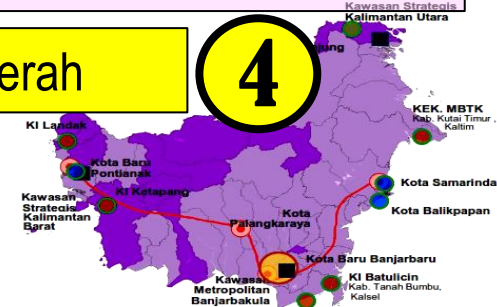


- 1** Penguatan Konektivitas antar Daerah & Kawasan Ekonomi & Pemerataan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi dan Sumber Daya Air yang terpadu diseluruh Wilayah

- ## Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Komoditi Unggulan Daerah ②

- 3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup & Pengendalian Perkembangan Kegiatan Budidaya agar tidak melampaui Daya Dukung & Daya tampung Lingkungan.

- ## Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah







# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA

## *Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kota Balikpapan*






		ARAH KEBIJAKAN	FOKUS PEMBANGUNAN
 		Peningkatan produktivitas pertanian hortikultura	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian hortikultura
		Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya
		Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan	Pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan provinsi, Peningkatan Upaya pengendalian banjir, Pengembangan Direct Call Pelabuhan Kariangau, Perluasan infrastruktur air bersih, Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
 		Pengembangan kawasan industri	Pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai kawasan industri pengolahan multi produk
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akreditasi puskesmas







## TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2023 DALAM P-RPJMD KALTIM

	2021	2022	2023
 <b>IPM</b>	<b>79,53</b>	<b>80,00</b>	<b>80,11</b>
 <b>TINGKAT KEMISKINAN</b>	<b>2,30</b>	<b>2,3-2,5</b>	<b>2,40</b>
 <b>TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA</b>	<b>4,55</b>	<b>8,70</b>	<b>7,30</b>
 <b>LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI</b>	<b>4,5-5,0</b>	<b>5,00</b>	<b>5,5-6,0</b>
 <b>INDEKS GINI</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>





# PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN TAHUN 2020-2024



MENTERI DALAM NEGERI  
DAN  
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Jakarta, 16 Juni  
Yth. 1. Gubernur.  
2. Bupati/Wali kota.  
di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA  
NOMOR : 050/3499/SJ  
NOMOR : 3 TAHUN 2021  
TENTANG

PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL  
TAHUN 2020-2024

Dalam rangka pencapaian target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 secara efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, diminta kepada Saudara/i untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyusunan serta penyelarasan dokumen RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan mengisi Instrumen Penyelarasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama ini.
2. Ruang lingkup penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan melalui:
  - a. Penyelarasan Target Indikator Makro (sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020); dan
  - b. Penyelarasan Program Prioritas (sesuai dengan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020).
3. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), maka:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap dokumen perencanaan nasional, melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024, dengan memperhatikan:

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024,

1. **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota WAJIB** melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap dokumen perencanaan nasional melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024, dengan memperhatikan:
  - a) Daerah yang melaksanakan PILKADA serentak tahun 2020, maka penyusunan RPJMD berpedoman pada materi muatan RPJMN tahun 2020-2024 dan **hasil penyelarasan RPJMD dimaksud menjadi LAMPIRAN DOKUMEN RPJMD** serta menjadi salah satu pedoman pada saat penyusunan RKPD.
2. **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dalam melakukan penyelarasan RPJMD dan RKPD dengan RPJMN tahun 2020-2024 mempertimbangkan RKP tahun rencana.
3. **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dalam penyusunan/revisi RPJMD memperhatikan amanat dari berbagai regulasi diantaranya terkait penataan ruang

Penyelarasan dilakukan pada **Aplikasi SIPD e-database**, hasil entri menjadi lampiran pada dokumen RPJMD





# PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN TAHUN 2020-2024

## LAMPIRAN I PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN

Tabel 1A.  
Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi					Indikator Pembangunan	RPJMD Kota / Kabupaten				
		Target						Target						Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)																	
2	Tingkat Kemiskinan (%)																	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)																	
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*																	
5	Rasio Gini*																	
6	Penurunan Emisi GRK (%)*																	

- Siapkan Tabel 1A Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.
- Isikan pernyataan indikator makro dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai wilayah provinsinya berikut target pembangunan wilayah provinsi tersebut secara berurutan ke dalam kolom (2), (3), (4), (5), (6), dan (7).
- Apabila dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tidak ada target di tahun tertentu, maka kolom (3) atau (4) atau (5) atau (6) atau (7) dapat dikosongkan.
- Pilih indikator makro RPJMD Provinsi berikut targetnya yang selaras dengan indikator makro di RPJMN Tahun 2020-2024 dan isikan secara berurutan ke dalam kolom (8), (9), (10), (11), (12), dan (13).
- Apabila indikator pembangunan dalam RPJMD Provinsi tidak ada yang selaras dengan indikator makro di RPJMN Tahun 2020-2024, maka kolom (8) dapat dikosongkan.
- Apabila dalam RPJMD Provinsi tidak ada target di tahun yang sama dengan tahun target di RPJMN Tahun 2020-2024, maka kolom (9) dan/atau (10) dan/atau (11) dan/atau (12) dan/atau (13) dapat dikosongkan.
- Pilih indikator makro RPJMD Kabupaten/Kota berikut targetnya yang selaras dengan indikator pembangunan di RPJMN Tahun 2020-2024 dan isikan secara berurutan ke dalam kolom (14), (15), (16), (17), (18), dan (19).
- Apabila indikator makro dalam RPJMD Kabupaten/Kota tidak ada yang selaras dengan indikator makro di RPJMN Tahun 2020-2024, maka kolom (14) dapat dikosongkan.
- Apabila dalam RPJMD Kabupaten/Kota tidak ada target di tahun yang sama dengan tahun target di RPJMN Tahun 2020-2024 dan/atau RPJMD Provinsi, maka kolom (15) dan/atau (16) dan/atau (17) dan/atau (18) dan/atau (19) dapat dikosongkan.
- Dalam hal kolom kolom (14) dikosongkan maka indikator makro RPJMD Kabupaten/Kota belum mendukung indikator makro Nasional.
- Dalam hal kolom (14), (15), (16), (17), (18), dan (19) lebih rendah dari kolom (9), (10), (11), (12), dan (13) (target Kabupaten/Kota lebih rendah dari target Provinsi), maka menjadi bahan koordinasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyesuaian.

\*) Untuk IPM, Rasio Gini, dan Penurunan Emisi GRK dalam RPJMN menggunakan target akhir periode sebagaimana pada lampiran IV RPJMN Tahun 2020-2024





# PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN TAHUN 2020-2024

## CONTOH PENGISIAN LAMPIRAN I PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN

CONTOH  
Kota Tegal :RPJMD 2019-2024

No	RPJMN Tahun 2020-2024						RPJMD Provinsi						RPJMD Kabupaten/Kota					
	Indikator Pembangunan	Target					Indikator Pembangunan	Target					Indikator Pembangunan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	5,80	5,90	6,10	6,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-5,7	5,4-5,8	5,8-5,8	5,6-6,0		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-5,90	5,70-6,10	5,70-6,10	5,80-6,20	5,80-6,20
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81	9,43	9,00	8,55	8,15	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81-8,81	9,05-8,05	8,27-7,27	7,48-6,48		Tingkat Kemiskinan (%)	6,40 - 7,40	6,20 - 7,20	5,99 - 6,99	5,79 - 6,79	5,59-6,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,20	4,00	3,80	3,40	3,10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,33	4,23	4,13	4,00		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,43	7,04	6,62	6,24	5,81
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*					74,60-84,23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,00	72,50	72,70	73,00		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	75,95	76,45	76,85	77,15
5	Rasio Gini*					0,360 - 0,474	Indeks Gini	0,34	0,33	0,32	0,3							
6	Penurunan Emisi GRK (%)					27,3	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e)	49.481,00	74.027,00	98.587,00	123.401,00		Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	7,00	6,75	6,50	6,25	6,00







# PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN TAHUN 2020-2024

## LAMPIRAN II PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN

Tabel 2.A

Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota terhadap Program Prioritas Nasional

No	Kode (PN/ PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi							RPJMD Kabupaten/Kota						
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
dst																						

- Siapkan Tabel 2.A Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota terhadap Program Prioritas Nasional.
- Isikan Prioritas Nasional dan Program Prioritas berikut kodenya (PN untuk Prioritas Nasional dan PP untuk Program Prioritas) beserta indikator dan targetnya secara berurutan ke dalam kolom (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9).
- Pilih Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi yang Indikator Kinerja Program (outcome) nya selaras dengan dengan isi kolom (4).
- Isikan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Program (outcome) yang selaras tersebut berikut target sesuai tahunnya secara berurutan ke dalam kolom (10), (11), (12), (13), (14), (15), dan (16).
- Apabila Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Program (outcome) tidak ada yang selaras, maka kolom (10), (11), (12), (13), (14), (15), dan (16) dapat dikosongkan.
- Pilih Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten/Kota yang Indikator Kinerja Program (outcome) nya selaras dengan dengan isi kolom (4).
- Isikan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Program (outcome) yang selaras tersebut berikut target sesuai tahunnya secara berurutan ke dalam kolom (17), (18), (19), (20), (21), (22), dan (23).
- Dalam hal kolom (17), (18), (19), (20), (21), (22), dan (23) dikosongkan, maka Program Prioritas Nasional tersebut belum didukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.





# PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN TAHUN 2020-2024

## CONTOH PENGISIAN LAMPIRAN II PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN

Contoh  
Kota Tegal : RPJMD 2019-2023

No	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi						RPJMD Kabupaten/Kota							
				Target					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	PN	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar							Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	Pembangunan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang disediakan	4,57	7,70	10,39	12,5		Program Fasilitasi Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni	85,71	87,81	88,10	88,80	89,50
			Persentase rumah tangga yang menempati	82,35	83,5	84,8	86	87		Persentase rumah tidak layak huni yang	10,35	19,31	28,28	37,24								





# HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMD

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

Beberapa masukan/saran penyempurnaan hasil konsultasi ranwal RPJMD

Kota Balikpapan 2021-2026, selengkapnya dapat dilihat pada

Surat Gubernur tentang penyampaian hasil Fasilitas Konsultasi Ranwal RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026

No	Bab / Sub-bab	Masukan / Usulan / Saran
<b>Bab I. Pendahuluan</b>		
1	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	<p>Agar menambahkan beberapa peraturan terkait pada dasar hukum penyusunan RPJMD seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;</li><li>3. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota;</li><li>5. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</li></ol>





# HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMD

## KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

No	Bab/Sub-bab	Masukan/Usulan/Saran
<b>Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah</b>		
2	2.1. Aspek Geografi dan Demografi	Pada pencantuman sumber data yang disajikan, disarankan untuk mengganti dengan Lembaga/organisasi/perangkat daerah yang melakukan analisis data serta tahun
3	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Disarankan untuk menambahkan data analisis kondisi daerah yang diturunkan pada tingkat kecamatan, seperti data sebaran kemiskinan tingkat kecamatan sehingga selaras dengan intervensi kebijakan di tingkat kecamatan
4	2.3. Aspek Pelayanan Umum	Dikemukakan masih terdapat permasalahan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan jumlah tenaga Kesehatan di beberapa puskesmas yang belum ideal, maka hal itu penting untuk menjadi perhatian karena terpenuhinya 5 Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		Menambahkan data luas genangan banjir perkotaan, hal ini ditujukan agar selaras dengan target yang ada di Provinsi
		Panjang jalan dan status jalan agar menyesuaikan dengan Kep.Men PUPR No. 290/KPTS/M/2015 ( Jalan Nasional ) dan Pergub No. 622 Tahun 2018 ( Jalan Provinsi )







# HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMD

## KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

No	Bab/Sub-bab	Masukan/Usulan/Saran
<b>Bab III. Gambaran Keuangan Daerah</b>		
5	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	<p>Pada realisasi pendapatan daerah yang disajikan memiliki angka yang berbeda dengan realisasi yang terdapat pada Rankhir RKPD Kota Balikpapan tahun 2022, hal ini sesuai rekomendasi pada Ranperwali RKPD Kota Balikpapan tahun 2022, data proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan, program prioritas dan pagu perangkat daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realisasi Pendapatan tahun 2019 pada Ranwal RPJMD sebesar Rp. 2,581 trilyun sedangkan pada Rankhir RKPD sebesar Rp. 2,469 trilyun (jumlah pendapatan ini tertuang pada tabel 3.11 bab 3 RPJMD)</li><li>• Berdasarkan tabel 3.15 (RPJMD) Proyeksi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp. 2,187 trilyun namun pada Rankhir RKPD 2022 sebesar Rp. 2,033 trilyun (apakah ada penyesuaian di RKPD 2022)</li></ul>
6	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	<p>Memperbaiki perhitungan SiLPA pada tabel 3.13 karena terdapat selisih pada perhitungan tahun 2018 tidak sesuai dengan rincian pembentuknya. SiLPA tahun 2018 sejumlah Rp. 291,63 milyar namun berdasarkan rincian total SiLPA sejumlah Rp. 2,903 milyar</p>
7	3.3 Kerangka Pendanaan	<p>Pada kebijakan belanja terdapat kebijakan untuk belanja transfer. Agar disesuaikan, jika terdapat belanja transfer agar mencantumkan kebijakannya dan jika tidak agar dihapus</p>





# HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMD

## KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

No	Bab/Sub-bab	Masukan/Usulan/Saran
<b>Bab IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah</b>		
8	4.2. Isu-Isu Strategis	Memperdalam telaahan terhadap RPJMD kabupaten yang berbatasan agar diperdalam, tidak hanya menyadur isi dokumen namun melakukan telaah keterkaitannya. dimungkinkan juga menyajikan potensi hal-hal yang perlu dikerjasamakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan pada daerah yang berbatasan seperti peningkatan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan pada wilayah perbatasan.
<b>Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b>		
9	5.1 Visi dan Misi	Pada penyajian korelasi isu strategis dan visi agar dianalisa kembali, karena perwujudan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan Madinatul Iman masih perlu digambarkan korelasinya. Pencapaian visi madinatul iman juga belum tergambarkan melalui indikator IKU/tujuan dan sasaran yang disajikan pada bab berikutnya.
10	5.2. Tujuan dan Sasaran	Berkaitan dengan tujuan dan sasaran pada tujuan 3 dan 4, dengan penyajian 1 sasaran pada pencapaian masing-masing tujuan tersebut perlu menambahkan sasaran dan atau indikator lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang dimaksud
<b>Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah</b>		
11	6.2. Arah Kebijakan Kewilayahan	Disarankan untuk menambahkan uraian dan rumusan strategi pembangunan terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi, mengingat kebijakan peningkatan perekonomian yang berkontradiksi dengan dengan peningkatan IKLH





# HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMD

## KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

No	Bab/Sub-bab	Masukan/Usulan/Saran
<b>Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah</b>		
12	6.3. Program Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	Agar mencermati kembali perbedaan target capaian kinerja dan pagu pendanaan untuk Program Penyelenggaraan Jalan pada hal VII-3 serta menganalisa indikator kinerja diselaraskan dengan indikator nasional yakni persentasi jalan dengan kondisi mantap
<b>Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>		
		Penyajian judul bab disesuaikan dengan sistematika pada Permendagri No. 86 tahun 2017 yakni Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
		Agar melakukan sinkronisasi dalam penentuan target tahun 2022 dst, untuk cakupan layanan air minum pada Bab 2 hal. 145 capaian pada tahun 2020 telah mencapai 81, 37% tetapi pada tahun 1 RPJMD (tahun 2022) terdapat penurunan menjadi 80,60%
		Seperti pada program PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM dengan indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan, sebaiknya nomenklatur indikator menggunakan capaian akses air minum jaringan perpipaan





# HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMD

## KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

01

Terhadap permasalahan ketenagakerjaan telah menjadi perhatian Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga perlunya sinergisitas melalui membangun Kerjasama dengan BLK Balikpapan milik Pemprov. Kaltim dan PK Swasta sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dan menjadi dukungan terhadap pencapaian Directive Gubernur Kaltim 250.000 penyerapan tenaga kerja

02

Pada bidang urusan perhubungan agar pemerintah Kota Bontang memperhatikan penyediaan layanan infrastruktur perkotaan seperti terminal angkutan barang yang tidak mengalami penambahan; koridor Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang tidak mengalami penambahan dan sarana prasarana; ATCS dan penambahan jalur sepeda dan Kinerja Jalan/Lalu Lintas (volume capacity ratio/VCR) dan penyediaan sarana keselamatan Lalu Lintas;

03

Capaian IDG Kota Balikpapan sejak 2016 – 2020 selalu diatas capaian Prov Kaltim, IDG tahun 2020 68,97, namun masih dibawah angka rata-rata IDG Nasional yaitu 75,57. Mengingat capaian IDG penting untuk menilai pemberdayaan perempuan, maka perlu upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam bidang Ekonomi terkait sumbangan pendapatan perempuan dan partisipasi dalam bidang politik

04

Disarankan untuk menyajikan data capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's pada akhir bab II seperti data jumlah indikator yang telah dicapai, belum tercapai dan belum dilaksanakan sehingga perlu upaya pencapaian target tersebut







# REKOMENDASI TERHADAP RANWAL RPJMD

## KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

**01**

**Bappedalitbang Kota Balikpapan melakukan Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sesuai dengan sistematika penyajian RPJMD yang tertuang pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**

**02**

**Bappedalitbang Kota Balikpapan melakukan penyelarasan Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

**03**

**Target indikator makro, dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 perlu memperhatikan target yang telah disepakati dalam Forum Pra-Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

**04**

**Menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 berdasarkan saran penyempurnaan sesuai dengan hasil fasilitasi Konsultasi**

**05**

**Melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program pembangunan daerah pada Rancangan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026**





# TERIMA KASIH

"KALTIM BERDAULAT MENUJU INDONESIA MAJU"

